ASPEK HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

¹ Indrie Lutfiana, ² Ni Ketut Ayu Wulandari

¹ email : abdullah08112011@gmail.com

STIKES BULELENG

ABSTRAK

Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk kajian pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang pelayanan kebidanan di Kabupaten Buleleng.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui aspek hukum pelaksanaan kewenangan bidan dalam pelayanan kebidanan. Desain penelitian ini desain penelitian kualitatif dengan studi deskriptif fenomenologi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 responden.

Dari hasil penelitian dapat diketahui dasar hukum dalam pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan dalam memenuhi standar pelayanan kebidanan meliputi UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, UU Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Kepmenkes 369 Tentang Standar Profesi Bidan Tahun 2007, Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Ri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Pelaksanaan kewenangan oleh bidan yang berkerja kurang dari 3 tahun sesuai dengan kewenangan bidan 38 kewenangan (100 %) dan BPM memberikan kewenangan 23 kewenangan (60,5 %) dari 38 kewenangan.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Kewenangan, Kebidanan

LEGAL ASPECT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF MIDWIVES IN MIDWIFERY SERVICES

The government and the community are responsible for ensuring that every mother has access to quality maternal health services. The purpose of this study was to study the implementation of the authority and competence of midwives in meeting health service standards, especially in the midwifery service sector in Buleleng Regency.

The purpose of this study was to determine the legal aspects of implementing the authority of midwives in midwifery services. This research design is a qualitative research design with a phenomenological descriptive study. The sample in this study were 25 respondents.

From the research results, it can be seen that the legal basis for implementing the authority and competence of midwives in meeting midwifery service standards includes Health Law Number 36 of 2009, Regional Government Law Number 23 of 2014, Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education, Kepmenkes 369 concerning Professional Standards of Midwives. 2007, Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education RI Number 44 of 2015 concerning National Standards for Higher Education and Permenkes No. 28 of 2017 concerning Licensing and Implementation of Midwife Practices.

The exercise of authority by midwives who have worked less than 3 years in accordance with the authority of midwives 38 authorities (100%) and BPM provides 23 authorities (60.5%) of 38 authorities

Key Word : legal aspect, authority, midwifery

1. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan pada dan pemberdayaan masyarakat bersama-hakekatnya diarahkan guna tercapainya sama dengan tenaga kesehatan lainnya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk senantiasa siap melayani siapa saja hidup sehat bagi setiap orang, yang membutuhkannya, kapan dan menyangkut fisik, mental, maupun sosial dimanapun dia berada. Survei budaya dan ekonomi¹. Bidan merupakan pendahuluan yang dilakukan di salah satu tenaga kesehatan yang satu Bidan Praktik Mandiri didapatkan memiliki posisi penting dan strategis data bahwa ada bidan praktik yang terutama dalam penurunan Angka diduga melakukan praktik kebidanan Kematian Ibu (AKI) dan angka kesakitan tidak sesuai dengan kewenangan dan kematian Bayi (AKB). Bidan sehingga menyebabkan terjadinya memberikan pelayanan kebidanan yang kematian pada ibu hamil. Pertolongan berkesinambungan dan paripurna, persalinan dilakukan oleh bidan yang berfokus pada aspek pencegahan, masih magang, sehingga bidan tersebut promosi dengan berlandaskan kemitraan menyalahi aturan karena melimpahkan

¹[https://www.poltekkesjakarta1.ac.id/read-gk-ep-pelayanan-kebidanan-dan-ruang-](https://www.poltekkesjakarta1.ac.id/read-gk-ep-pelayanan-kebidanan-dan-ruang-lingkupnya)

[lingkupnya,pelayanan](https://www.poltekkesjakarta1.ac.id/read-gk-ep-pelayanan-kebidanan-dan-ruang-lingkupnya) kebidanan dan ruang lingkupnya, 15 Juli 2017

kewenangan pada calon bidan yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Pelayanan kebidanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan oleh bidan sesuai kewenangan bidan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga terutama ibu dan anak sehingga terwujud keluarga bahagia, sejahtera dan berkualitas². Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, kewenangan bidan tidak hanya terkait dengan pertolongan asuhan kebidanan fisiologis tetapi kewenangan bidan juga mencakup asuhan kebidanan dengan komplikasi. Kewenangan normal merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap bidan. Kewenangan bidan untuk menjalankan program pemerintah merupakan kewenangan khusus bagi bidan yang bekerja untuk pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah. Sedangkan kewenangan bidan yang tidak memiliki dokter pada daerah tertentu merupakan kewenangan pelimpahan bagi bidan namun kewenangan tersebut akan dicabut apabila di daerah tersebut sudah terdapat dokter. Bidan dalam menjalankan tugasnya harus memiliki pendidikan yang formal, mempunyai sistem pelayanan, kode etik dan etika kebidanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, dalam hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Buleleng memiliki cakupan K4 94.7 % yang belum mencapai target yang diharapkan yaitu 95 %. Angka kematian yang tinggi dapat dipengaruhi juga oleh angka kelahiran yang tinggi yang

disebabkan ketidak inginan pasangan suami istri untuk ber KB, cakupan KB sebesar 77.8 %, ini berarti cakupan KB belum mencapai target yang diharapkan yaitu 80 %. Cakupan penangan komplikasi resiko tinggi sebesar 65.8 % yang seharusnya capaian targetnya adalah 100 %. Dan cakupan pemberian tablet Fe sebesar 92.95 % yang seharusnya adalah 100 %³. Dengan data diatas menunjukkan adanya pelayanan kebidanan yang tidak optimal sehingga angka kematian maternal di Kabupaten Buleleng masih tinggi, oleh sebab itu pelayanan kebidanan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

1) Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif dengan studi deskriptif dengan metode survey. Desain ini digunakan karena melihat masih adanya perbedaan pelaksanaan kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan masa kerja bidan.

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juni 2019 sampai dengan Desember 2019 dan dilakukan di Wilayah Kabupaten Buleleng.

3) Variabel yang Diukur

Variabel penelitian ini adalah aspek hukum kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan.

4) Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (berdasarkan ciri kelompoknya) berdasarkan kriteria inklusi. Adapun subjek penelitian ini adalah bidan yang ada di Wilayah Kabupaten Buleleng. Narasumber dalam penelitian ini diantaranya Ketua IBI PC Buleleng.

5) Alat/Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Data yang didapat

³ Internet, Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, 2014, <http://www.dinkes.baliprov.go.id>

kemudian akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

6) Analisis Data

. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan software SPSS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Kewenangan

- 1) Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Penyelenggaraan praktik kebidanan memiliki payung hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut bidan merupakan bidang profesi yang harus menjalankan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya. berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur “Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan diatur pada Pasal 23 ayat (3) “Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah“. Sesuai dengan peraturan tersebut, Pasal 23 Ayat (5), “ Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri. Penyelenggaraan izin praktik bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertujuan agar Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab, memiliki etika dan

moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan.

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berdasarkan kewenangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) undang-undang tenaga kesehatan yaitu “ Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangannya yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya”. Kewenangan yang dimaksud berdasarkan kompetensi dijelaskan adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan secara mandiri sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Pelimpahan wewenang bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pelimpahan Wewenang tindakan pelayanan kesehatan oleh bidan diatur pada Pasal 22 butir (b) yaitu pelimpahan wewenang yang dilakukan bidan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan diberikan secara mandat dari dokter, pelayanan kesehatan yang diberikan secara mandat oleh dokter kepada bidan akan menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi mandat.

Penyelenggaraan praktik bidan sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No 900 Tahun 2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan. Pasal 14 menyebutkan kewenangan bidan meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam Keputusan tersebut seorang bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat melakukan kewenangan normal maupun abnormal berdasarkan

B. Pengaturan Kewenangan Bidan dalam memenuhi Standar Pelayanan Kebidanan

Pasal 11 dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menegaskan bidan adalah salah satu tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan didalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. UU NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 menyebutkan bahwa “Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan “ dan dalam hal ini Kewenangan bidan diatur dalam Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Seorang bidan dalam menjalankan kewenangan harus sesuai dengan standar profesi, memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilakukan dan mengutamakan kesehatan ibu dan bayi atau janin.

Kewenangan yang tercantum dalam Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan memberikan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, anak balita dari konseling sampai dengan penanganan kegawatdaruratan selanjutnya diikuti dengan rujukan.

C. Pelaksanaan Kewenangan Tabel Distribusi bidan melakukan kewenangan bidan di tempat kerja

Pasal 21 Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan mengatur secara tegas bahwa kewenangan bidan dalam kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana terbatas dalam penyuluhan & konseling kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi oral, kondom dan suntikan, Sedangkan dalam Kepmenkes 369 Tentang Standar Profesi Bidan Tahun 2007 mengatur bahwa kompetensi bidan yang kedua adalah Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bersama dengan organisasi profesi.

Selanjutnya Kewenangan bidan sesuai dengan Peraturan izin penyelenggaraan bidan adalah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Pada peraturan tersebut kewenangan bidan adalah penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sedangkan pada standar pelayanan kebidanan kesehatan reproduksi adalah deteksi dini kanker melalui pemeriksaan IVA khusus mulai usia 30-59 tahun.

2. Pembahasan

A. Pengaturan Kewenangan

N o	Tempat	Bekerja <3 tahun	Bekerja ≥ 3 tahun
1	BPM Kubutambahan	25 kewenangan	38 kewenangan
2	BPM Sangsit	31 kewenangan	38 kewenangan
3	BPM Sawan I	31 kewenangan	38 kewenangan
4	BPM Sawan II	23 Kewenangan	38 kewenangan

1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini mengandung asas keadilan yang tertuang pada Pasal 23 ayat (1) yang sesuai dengan teori yang dikemukakan menurut aristoteles tentang keadilan berbasis persamaan. Dalam Pasal ini tertuang jelas kesamaan derajat setiap orang dalam hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan lebih tinggi dari pada peraturan menteri kesehatan, jadi sesuai dengan ketentuan tersebut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berhak mengamankan peraturan yang lebih rendah dan ini sesuai dengan pernyataan pada Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 ayat (3) yang mengamankan tentang izin

penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tidak hanya melakukan pelayanan sesuai kewenangan mandiri tetapi dapat melaksanakan pelayanan kesehatan diluar kewenangan bidan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 65 ayat (1) mengatur tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Yang dikelompokkan tenaga medis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah Dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter spesialis gigi. Dari Pasal 65 ayat (1) tersebut bidan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis dan yang bertanggung jawab jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis adalah yang memberikan mandat.

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Kewenangan bidan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

B. Pengaturan Kewenangan Bidan dalam memenuhi Standar Pelayanan Kebidanan

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam amanat mendasar Undang-undang 1945 adalah upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan dalam segala aspek guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan ditingkatkan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan kuratif yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya tenaga kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, salah satu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kebidanan “Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas” . Pelayanan kebidanan terdiri dari pelayanan primer, pelayanan sekunder dan pelayanan tersier.

2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, yang terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, balita dan pelayanan usia reproduktif.

C. Pelaksanaan Kewenangan

BPM Sangsit dan BPM Kubutambahan hanya memberikan 31 kewenangan dari 38 kewenangan. Kewenangan yang tidak diberikan oleh kepala BPM Sangsit Dan Kubutambahan adalah kewenangan yang kepala bidan anggap beresiko menyebabkan kesakitan atau kematian pada ibu dan bayi. Sehingga bidan tidak dapat memberikan secara penuh kewenangan tersebut. Kepala

BPM Sawan I dan Sawan II masing-masing hanya memberikan 23 dan 25 kewenangan dari 38 kewenangan. Dari pernyataan bidan mengatakan kewenangan yang diberikan hanya 23 dan 25 kewenangan tetapi kewenangan yang lainnya diberikan dengan pengawasan. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, bidan yang sudah lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi seharusnya sudah dapat menjalankan kewenangannya. Dan bidan sudah dianggap cakap dalam menjalankan pelayanan kebidanan sesuai kewenangannya.

4. KESIMPULAN

- A. Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 Ayat 1 bahwa tenaga kesehatan berwenang melakukan pelayanan Kesehatan dan Pasal 23 Ayat (5) penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus mendapatkan izin dari pemerintah.
- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 62 ayat (1) dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya dan Pasal 65 ayat (1) dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan dari tenaga medis lainnya.
- C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 18, bidan dalam memiliki kewenangan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi & keluarga berencana.

- D. Pelaksanaan Pemberian kewenangan bidan sesuai dengan hasil penelitian mencapai 100 % pada bidan yang bekerja lebih dari tiga tahun dan bagi bidan yang bekerja sebelum tiga tahun hanya diberikan kewenangan 60,5 %. Dari hasil yang didapatkan,
- E. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kebidanan oleh 30 bidan yang bekerja diatas tiga tahun mencapai 100 % dan dari 30 bidan yang bekerja dibawah tiga tahun sebagian besar pelaksanaannya 90 % dan ada dua bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan sebanyak 50 %.

5. REFERENSI

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, 2016, Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016, Buleleng : Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah). Bumi Aksara. Jakarta

Iqbal Wahid & Nurul chayatin, 2009, Ilmu Kesehatan Masyarakat (teori dan aplikasi), Jakarta : Salemba Medika

J. Guwandi, 1996, Dokter Pasien dan Hukum, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Lexy Moleong, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Lutfi Effendi, 2003, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Malang : Bayumedia Publishing

Mufdhilah, dkk, 2012, Konsep Kebidanan, Yogyakarta : Muha Medika

Najih Mokhammad, 2016, Pengantar Hukum Indonesia, Malang : Setara Press

Oka Mahendra, Pedoman Praktis Legal Drafting, 2017, Malang
Prof dr Ida Bagus Gede Manuaba, 1998, Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan, Jakarta : EGC

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta

Roni Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta